



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

Lamongan
Megilan

RENJA (RENCANA KERJA) 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dimasa yang akan datang.

Akhirnya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dan semoga mendapatkan petunjuk serta bimbingan Allah SWT sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mampu melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan prestasi kerja.

Lamongan, 29 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan	
Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
PD	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	53
BAB. III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA.....	55
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	56
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	
DAERAH.....	59
BAB. V PENUTUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2022.
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Lamongan
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2023 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Renstra Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan Rancangan Awal
- c. Penyusunan Rancangan
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

- e. Perumusan Rancangan Akhir
- f. Penetapan

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara

Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan RKPD;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
11. Peraturan Daerah Jawa Timar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timar Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No 39);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026,
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- 1 Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
- 2 Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan aset/barang daerah.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1 Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2023;
- 2 Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2023;
- 3 Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BPKAD Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PD

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD;
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan untuk 1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan; 3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan selama Tahun 2021 dan perkiraan target Tahun 2022.

Pada Tahun 2021 Total Anggaran BPKAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 664.978.699.841,00 dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 20.259.104.274,00, Belanja Modal Rp. 1.736.344.400,00, Belanja Tak Terduga Rp. 30.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 612.983.251.167,00 yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 program dan 13 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 17.827.280.863,00, Belanja Modal Rp. 728.109.100,00, Belanja Tak Terduga Rp. 19.385.935.437,28 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 612.891.459.166,70 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97.87%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2022 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD
s/d Tahun 2022 Kabupaten Lamongan**

Nama PD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2021- 2026	Realis asi Target Kinerj a Hasil Progra m dan Kelu ar an Kegiat an s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangk at Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2022)	
									Target Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2021	Tingka t Realis asi (%)		Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingka t Capai an Realis asi Target Renstr a (%)
5.0	3	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	85,00%		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	85,0%	3 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen		2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	100%	2 Dokumen, 4 Dokumen	2 Dokumen, 4 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan		3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	5 dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	35 ASN		35 ASN	35 ASN	100%	35 ASN	35 ASN	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan	32 kali		32 kali	32 kali	100%	32 kali	32 kali	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPRRA)	7 laporan		7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	7 laporan	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan		12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	12 laporan	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%		100%	0%	0%	100%	0%	0%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 orang		70 orang	0	0%	75 orang	0	0%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik		27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	100%	27 Jenis alat listrik	27 Jenis alat listrik	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan	62 jenis		5 orang	5 orang	100%	62 jenis	5 orang	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	73 jenis ATK		64 jenis ATK	64 jenis ATK	100%	73 jenis ATK	64 jenis ATK	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan		10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	100%	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	10 Jenis Cetak dan 17 Penggandaan	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 jenis buku		10 jenis buku	10 jenis buku	100%	12 jenis buku	10 jenis buku	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air		69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	100%	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan mobil jabatan	2 Unit Roda 4		3 unit	3 unit	100%	2 Unit Roda 4	3 unit	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	4 Unit Roda 4, 1 Minibus		1 unit roda 4	1 unit roda 4	100%	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	1 unit roda 4	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	7 rak arsiip		7 rak arsiip	7 rak arsiip	100%	7 rak arsiip	7 rak arsiip	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2 komputer		1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	100%	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2 komputer	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	5 Jenis Tagihan		3 Jenis	3 Jenis	100%	5 Jenis Tagihan	3 Jenis	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honoerer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	38 orang		38 orang	38 orang	100%	38 orang	38 orang	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.0 2	3 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2		1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	100%	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4		9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	100%	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	118 unit mebeleur		30 unit mebeleur	30 unit mebeleur	100%	118 unit mebeleur	30 unit mebeleur	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan		30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	100%	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	100%
5.0 2	3 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung		1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	100%	1 paket taman, 1 unit gedung	1 paket taman, 1 unit gedung	100%

5.0 2	3 1	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	0 9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali		2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan		288 laporan	288 laporan	100%	288 laporan	288 laporan	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen		260 dokumen	260 dokumen	100%	260 dokumen	260 dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan		14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	14 laporan	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D seacara tepat waktu	65 OPD		65 OPD	65 OPD	100%	65 OPD	65 OPD	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	0 9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 OPD		65 OPD	65 OPD	100%	65 OPD	65 OPD	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	100 buku		100 buku	100 buku	100%	100 buku	100 buku	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD		65 OPD	65 OPD	100%	65 OPD	65 OPD	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen		65 Dokumen, 130 dokumen	65 Dokumen, 130 dokumen	100%	65 Dokumen, 130 dokumen	65 Dokumen, 130 dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100 persen		100 persen	100 persen	100%	100 persen	100 persen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	0 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	1 0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen		65 Dokumen	65 Dokumen	100%	65 Dokumen	65 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 3	1 2	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen		65 Dokumen	65 Dokumen	100%	65 Dokumen	65 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	462 Desa		462 Desa	462 desa	100%	462 Desa	462 desa	100%

5.0 2	3 1	0 2	2.0 4	0 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	2 kali		2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 4	0 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak	1 Dokumen		1 paket	1 paket	100%	1 Dokumen	1 paket	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 5	0 1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 2	2.0 5	0 2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali		2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
5.0 2	3 1	0 3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

5.0 2	3 1	0 3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen		3 dok pelaporan , 4 dok produk hukum dan 3 dok pengaman	3 dok pelaporan , 4 dok produk hukum dan 3 dok pengaman	100%	4 Dokumen	3 dok pelaporan , 4 dok produk hukum dan 3 dok pengaman	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBM	1 Dokumen		masing-masing 150 buku	masing-masing 150 buku	100%	1 Dokumen	masing-masing 150 buku	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	1 Dokumen		250 buku	250 buku	100%	1 Dokumen	250 buku	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	10 buku dan 65 OPD		180 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD	100%	10 buku dan 65 OPD	180 buku dan 65 OPD	100%

5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD		11 buku dan 65 OP	11 buku dan 65 OP	100%	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	11 buku dan 65 OP	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	12 buah, 30 bidang		1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	100%	12 buah, 30 bidang	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	0 9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	3 Dokumen		12 SK	12 SK	100%	3 Dokumen	12 SK	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD		65 OPD	65 OPD	100%	65 OPD	65 OPD	100%

5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	65 OPD		150 buku dan 65 OPD	150 buku dan 65 OPD	100%	65 OPD	150 buku dan 65 OPD	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	2 Dokumen		65 OPD	65 OPD	100%	2 Dokumen	65 OPD	100%
5.0 2	3 1	0 3	2.0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD		65 OPD	65 OPD	100%	65 OPD	65 OPD	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	-	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah	99%	95%	96%	97%	100%		96%	97%	-
2	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	-	Pengukuran untuk menghitung Penyerapan Realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah	9,8%	10%	9,85%	9,85%	7,5%		9,85 %	9,85 %	
3	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	-	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%		100 %	100 %	
4	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	-	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki	95%	87%	89%	91%	96%		89%	91%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Lamongan, organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang mempunyai tugas penunjang Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kabupaten Lamongan dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

- 1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

- 1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

- 1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Lamongan.
- 2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.

- 3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

- 1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
- 2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
- 3) Masih kurangnya kompetensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
- 5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksaan fungsional.
- 6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Lamongan diantaranya :

1. Penyusunan Perencanaan APBD harus disusun secara realable untuk mencapai ekonomi pembangun;
2. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengalami Refocusing (penganggaran yang dinamis);
3. Mengidentifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan aset agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan aset daerah untuk membantu pendapatan bagi daerah;
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku
5. Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian;

6. OPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun, Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2023 yang telah diusulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2023 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Tabel T-C.31
Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	KEUANGAN				Rp 546.293.100.925					Rp 713.010.476.026	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85 %	Rp 17.336.196.037	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Kab. Lamon gan	IKM Internal BPKAD	85 %	Rp 16.888.896.675	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokum en	Rp 270.001.894	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokum en	Rp 350.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokum en	Rp 75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokum en	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokum en	Rp 5.001.894	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokum en	Rp 50.000.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokum en	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokum en	Rp 50.000.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokum en	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokum en	Rp 50.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokum en	Rp 5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokum en	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lapora n	Rp 75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Lapora n	Rp 50.000.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapora n	Rp 100.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapora n	Rp 50.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	6 Dokum en	Rp 11.399.294.143	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Tepat Waktu	4 Dokum en	Rp 10.363.264.675	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/b ulan	11.014.294.143	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/b ulan	10.013.264.675	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokum en	60.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokum en	50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokum en	65.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokum en	50.000.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokum en	50.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokum en	50.000.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Lapora n	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Lapora n	50.000.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokum en	40.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokum en	50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeste SKPD	12 Lapora n	65.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeste SKPD	12 Lapora n	50.000.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokum en	40.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokum en	50.000.000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 % 0	Rp 250.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 % 0	Rp 250.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Rp 175.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Lamon gan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Rp 200.000.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	10 % 0	Rp 610.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	10 % 0	Rp 600.000.000	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 90.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 100.000.000	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 90.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Rp 100.000.000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 90.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 100.000.000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 90.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 100.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 2 Dokum en	Rp 50.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	37 2 Dokum en	Rp 50.000.000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lapora n	Rp 200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lapora n	Rp 150.000.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	10 % 0	Rp 2.205.016.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Terpenuhi Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	10 % 0	Rp 2.828.748.000	
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 1.500.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 785.016.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 1.000.000.000	
3	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon	Jumlah Paket Mebel yang	16 8 Unit	Rp 200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Lamon	Jumlah Paket Mebel yang	16 8 Unit	Rp 128.748.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
		gan	Disediakan				gan	Disediakan			
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	Rp 220.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamon gan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	Rp 200.000.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	10 % 0	Rp 1.881.884.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	10 % 0	Rp 1.881.884.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	Rp 987.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapora n	Rp 987.400.000	
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	Rp 894.484.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapora n	Rp 894.484.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	10 % 0	Rp 720.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lamon gan	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	10 % 0	Rp 615.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 55.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 70.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 165.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lamongan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 150.000.000	
3	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lamongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Rp 25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Lamongan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Rp 20.000.000	
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Rp 75.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Rp 75.000.000	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 400.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lamongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 300.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamon gan	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	10 % 0	Rp 528.090.996.888	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Lamon gan	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	10 % 0	Rp 694.981.579.351	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokum en	Rp 1.049.519.106	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokum en	Rp 1.339.209.100	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 103.807.900	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 140.875.400	
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 119.736.200	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokum en	Rp 155.203.700	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 72.161.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 72.161.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 67.013.200	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Lamon gan	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokum en	Rp 82.313.200	
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokum en	Rp 330.900.403	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokum en	Rp 405.584.100	
6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokum en	Rp 330.900.403	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokum en	Rp 404.550.700	
7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokum en	Rp 10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokum en	Rp 64.431.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
8	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 0 Orang	Rp 15.000.000	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	12 0 Orang	Rp 14.090.000	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Lapora n	Rp 1.133.050.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Lapora n	Rp 1.100.000.000	
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokum en	Rp 126.975.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokum en	Rp 127.043.600	
2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Lapora n	Rp 70.000.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Lapora n	Rp 36.881.400	
3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37 2 Dokum en	Rp 126.975.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	37 2 Dokum en	Rp 126.975.000	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokum en	Rp 25.375.000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokum en	Rp 25.375.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokum en	Rp 126.975.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokum en	Rp 126.975.000	
5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokum en	Rp 50.750.000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokum en	Rp 50.750.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lapora n	Rp 50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Lapora n	Rp 50.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
7	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Lapora n	Rp 236.275.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Lapora n	Rp 236.275.000	
8	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokum en	Rp 111.650.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Lamon gan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokum en	Rp 111.650.000	
9	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	Rp 208.075.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	Rp 208.075.000	
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang	4 Dokum en	Rp 818.176.350	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang	4 Dokum en	Rp 1.100.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	Pelaporan Keuangan Daerah		disusun			Pelaporan Keuangan Daerah		disusun			
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 15.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 25.000.000	
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	62 Dokumen	Rp 45.000.000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	62 Dokumen	Rp 114.000.000	
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pertanggungjawab n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 105.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Pertanggungjawab n Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 124.440.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Lapora n	Rp 188.176.350	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Lapora n	Rp 243.760.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokum en	Rp 260.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokum en	Rp 338.000.000	
6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan	2 Dokum en	Rp 15.000.000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan	2 Dokum en	Rp 25.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
	APBD		APBD			APBD		APBD			
7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokum en	Rp 35.000.000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokum en	Rp 43.000.000	
8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 65.000.000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 71.000.000	
9	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 25.000.000	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokum en	Rp 64.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab n Pemerintah Kabupaten/Kota	14 5 Orang	Rp 50.000.000	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab n Pemerintah Kabupaten/Kota	14 5 Orang	Rp 28.000.000	
11	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembaga	Rp 15.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Kab. Lamon gan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembaga	Rp 23.800.000	
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 525.090.251.432	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 691.370.819.751	
1	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lapora n	Rp 15.000.000.000	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Lapora n	Rp 10.767.587.143	
2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lapora n	Rp 485.090.251.432	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Lapora n	Rp 649.103.232.608	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 25.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Lamongan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 31.500.000.000	
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	3 Aplikasi	Rp -	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	3 Aplikasi	Rp 71.550.500	
1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp -	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp 47.726.700	
2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Rp -	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Lamongan	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Rp 23.823.800	
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamongan	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	10 % 0	Rp 865.908.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Lamongan	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan hukum	10 % 0	Rp 1.140.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokum en	Rp 865.908.000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokum en	Rp 1.140.000.000	
1	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokum en	Rp 63.500.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokum en	Rp 150.000.000	
2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 30.000.000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp -	
3	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	
4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 50.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp -	
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Lapora n	Rp 54.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Lapora n	Rp 130.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Lapora n	Rp 118.518.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Lapora n	Rp 165.000.000	
7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lapora n	Rp 119.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Lapora n	Rp 155.000.000	
8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Lapora n	Rp 110.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Lapora n	Rp 110.000.000	
9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 35.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan , Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokum en	Rp 250.000.000	

N O	RANCANGAN AWAL					Hasil Analisis Kebutuhan					Catat an Penti ng
	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiata n/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana Indikatif (Rp.000)	
1 0	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Lapora n	Rp 90.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Lapora n	Rp -	
1 1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lapora n	Rp 110.890.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lamon gan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Lapora n	Rp 130.000.000	
1 2	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13 Orang	Rp 35.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13 Orang	Rp -	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah.

BPKAD sebagai Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keuangan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu BPKAD dalam hal ini mengkoordinasikan Pelaksanaan Anggaran dari program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang nantinya ditujukan langsung kepada perangkat daerah terkait.

Tabel T-C.32
Ususulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NHIL					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, adalah:

- Terjaganya kesinambungan fiskal;
- Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan kelembagaan.

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misi adalah:

- Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran,
- Pelayanan Perbendaharaan Sesuai Standart Daerah,

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset,
- Pelaporan keuangan Daerah Serta Pemantauan dan Pembinaan Teknis Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Terpadu

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Sebagaimana disampaikan pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 serta RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah :

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Untuk mewujudkan visi diatas, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan **Misi** ke 5 (Lima) sebagai berikut :

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi “

Sedangkan untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

“Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah “.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas serta Pengelolaan BMD yang Optimal.

Indikator:

- a. Prosentase Akurasi Penganggaran APBD ;
- b. Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target;
- c. Prosentase Penyampaian LKPD Tepat Waktu Dan Sesuai SAP;
- d. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset ;

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 berdasarkan strategi dan kebijakan, ada sebanyak 3 program dan 12 Kegiatan dan 77 Sub Kegiatan dengan Rencana Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 697.914.341.094 yang bersumber dari dana APBD.

Sementara pada Tahun 2021 terealisasi rincian Belanja Operasional sebesar Rp. 17.827.280.863,00, Belanja Modal Rp. 728.109.100,00, Belanja Tak Terduga Rp. 19.385.935.437,28 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 612.891.459.166,70 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97.87%. Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu Tahun 2022 kami perkirakan bahwa pelaksanaan program/ kegiatannya akan sesuai dengan target rencana. Pencapaian kinerja Tahun 2022 masih dalam tahun berjalan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui lima misi. Oleh karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (lima) yaitu **“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”** dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu **“Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”**.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5												
5	2				KEUANGAN			Rp 713.010.476.026				Rp 753.175.566.394
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Internal BPKAD	85 %	Rp 16.888.896.675	APBD		85 %	Rp 17.964.926.143
5	2	1	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tepat Waktu	3 Dokumen	Rp 350.000.000	APBD		100 %	Rp 305.000.000
5	2	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp 50.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	1	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	1	2,01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	1	2,01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 5.000.000
5	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Rp 50.000.000	APBD		6 Laporan	Rp 50.000.000
5	2	1	2,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Rp 50.000.000	APBD		4 Laporan	Rp 50.000.000
5	2	1	2,0		Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	4 Dokumen	Rp 10.363.264.675	APBD		4 Dokumen	Rp 11.414.294.14

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
			2		Daerah	Tepat Waktu						3
5	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	10.013.264.675	APBD		41 orang/bulan ASN	Rp 11.014.294.143
5	2	1	2,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	50.000.000	APBD		14 Dokumen	Rp 60.000.000
5	2	1	2,02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	50.000.000	APBD		12 Dokumen	Rp 65.000.000
5	2	1	2,02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	50.000.000	APBD		7 Dokumen	Rp 65.000.000
5	2	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Laporan	50.000.000	APBD		7 Laporan	Rp 65.000.000
5	2	1	2,02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen	50.000.000	APBD		5 Dokumen	Rp 40.000.000
5	2	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	12 Laporan	50.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 65.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD						
5	2	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp 40.000.000
5	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan terpenuhinya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 % 0	Rp 250.000.000	APBD		100 %	Rp 250.000.000
5	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Rp 50.000.000	APBD		3 Paket	Rp 50.000.000
5	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	81 Orang	Rp 200.000.000	APBD		77 Orang	Rp 200.000.000
5	2	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani Dengan Baik	10 % 0	Rp 600.000.000	APBD		100 %	Rp 650.000.000
5	2	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 100.000.000	APBD		1 Paket	Rp 100.000.000
5	2	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	2 Paket	Rp 100.000.000	APBD		2 Paket	Rp 100.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						Disediakan						
5	2	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Rp 100.000.000	APBD		3 Paket	Rp 100.000.000
5	2	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 100.000.000	APBD		2 Paket	Rp 100.000.000
5	2	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	372 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		372 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Rp 150.000.000	APBD		3 Laporan	Rp 200.000.000
5	2	1	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100 %	Rp 2.828.748.000	APBD		100 %	Rp 2.848.748.000
5	2	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	Rp 1.500.000.000	APBD		2 Unit	Rp 1.500.000.000
5	2	1	2,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	Rp 1.000.000.000	APBD		4 Unit	Rp 1.000.000.000
5	2	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	168 Unit	Rp 128.748.000	APBD		168 Unit	Rp 128.748.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	9 Unit	Rp 200.000.000	APBD		19 Unit	Rp 220.000.000
5	2	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit Internal Terlayani Dengan Baik	100 %	Rp 1.881.884.000	APBD		100 %	Rp 1.881.884.000
5	2	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 987.400.000	APBD		12 Laporan	Rp 987.400.000
5	2	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp 894.484.000	APBD		12 Laporan	Rp 894.484.000
5	2	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kondisi Baik	100 %	Rp 615.000.000	APBD		100 %	Rp 615.000.000
5	2	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Rp 70.000.000	APBD		1 Unit	Rp 70.000.000
5	2	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp 150.000.000	APBD		8 Unit	Rp 150.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	1	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	Rp 20.000.000	APBD		25 Unit	Rp 20.000.000
5	2	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	Rp 75.000.000	APBD		75 Unit	Rp 75.000.000
5	2	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 300.000.000	APBD		1 Unit	Rp 300.000.000
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100 %	Rp 694.981.579.351	APBD		100 %	Rp 734.140.640.251
5	2	2	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	Rp 1.339.209.100	APBD		4 Dokumen	Rp 1.328.000.000
5	2	2	2,01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 140.875.400	APBD		2 Dokumen	Rp 145.000.000
5	2	2	2,01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Rp 155.203.700	APBD		2 Dokumen	Rp 156.000.000
5	2	2	2,01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Rp 72.161.000	APBD		65 Dokumen	Rp 73.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	2	2,01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	62 Dokumen	Rp 82.313.200	APBD		65 Dokumen	Rp 68.000.000
5	2	2	2,01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Rp 405.584.100	APBD		2 Dokumen	Rp 406.000.000
5	2	2	2,01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Rp 404.550.700	APBD		2 Dokumen	Rp 406.000.000
5	2	2	2,01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	Rp 64.431.000	APBD		1 Dokumen	Rp 26.000.000
5	2	2	2,01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	Rp 14.090.000	APBD		120 Orang	Rp 48.000.000
5	2	2	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	12 Laporan	Rp 1.100.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 1.290.000.000
5	2	2	2,02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	12 Dokumen	Rp 127.043.600	APBD		12 Dokumen	Rp 175.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Daerah	Pengelolaan Kas Daerah						
5	2	2	2,02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3 Laporan	Rp 36.881.400	APBD		3 Laporan	Rp 70.000.000
5	2	2	2,02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	372 Dokumen	Rp 126.975.000				Rp 150.000.000
5	2	2	2,02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	Rp 25.375.000	APBD		372 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	2	2,02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	22 Dokumen	Rp 126.975.000	APBD		22 Dokumen	Rp 145.000.000
5	2	2	2,02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen	Rp 50.750.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	2	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	Rp 50.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 75.000.000
5	2	2	2,02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Laporan	Rp 236.275.000	APBD		12 Dokumen	Rp 250.000.000
5	2	2	2,02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	1 Dokumen	Rp 111.650.000	APBD		1 Dokumen	Rp 125.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
					Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kegiatan						
5	2	2	2,02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 orang	Rp 208.075.000	APBD		80 orang	Rp 200.000.000
5	2	2	2,03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Rp 1.100.000.000	APBD		4 Dokumen	Rp 1.715.000.000
5	2	2	2,03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	Rp 25.000.000	APBD		12 Laporan	Rp 50.000.000
5	2	2	2,03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	62 Dokumen	Rp 114.000.000	APBD		62 Dokumen	Rp 200.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	2	2,03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	Rp 124.440.000	APBD		12 Laporan	Rp 150.000.000
5	2	2	2,03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	94 Laporan	Rp 243.760.000	APBD		1 Laporan	Rp 300.000.000
5	2	2	2,03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	Rp 338.000.000	APBD		7 Dokumen	Rp 350.000.000
5	2	2	2,03	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Rp 25.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 75.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	2	2,03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Rp 43.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 100.000.000
5	2	2	2,03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 71.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 100.000.000
5	2	2	2,03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Rp 64.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 100.000.000
5	2	2	2,03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	145 Orang	Rp 28.000.000	APBD		145 Orang	Rp 190.000.000
5	2	2	2,03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	34 Lembaga	Rp 23.800.000	APBD		34 Lembaga	Rp 100.000.000
5	2	2	2,04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	1 Dokumen	Rp 691.370.819.751	APBD		1 Dokumen	Rp 729.735.819.751

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	2	2,04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Rp 10.767.587.143	APBD		1 Laporan	Rp 10.767.857.143
5	2	2	2,04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Rp 649.103.232.608	APBD		1 Laporan	Rp 683.967.962.608
5	2	2	2,04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Rp 31.500.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 35.000.000.000
5	2	2	2,05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Penyediaan Sistem Informasi keuangan daerah yang informatif	3 Aplikasi	Rp 71.550.500			4 Dokumen	Rp 71.820.500
5	2	2	2,05	1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Rp 47.726.700			1 Dokumen	Rp 47.996.700
5	2	2	2,05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen	Rp 23.823.800			1 Dokumen	Rp 23.823.800
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Prosentase laporan baran milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, fisik dan	10 %	Rp 1.140.000.000	APBD		100 %	Rp 1.070.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						hukum						
5	2	3	2,01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	10 Dokumen	Rp 1.140.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 1.070.000.000
5	2	3	2,01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	Rp 150.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 110.000.000
5	2	3	2,01	3	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp -
5	2	3	2,01	5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 50.000.000
5	2	3	2,01	6	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp -	APBD		1 Dokumen	Rp -
5	2	3	2,01	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	Rp 130.000.000	APBD		4 Laporan	Rp 55.000.000
5	2	3	2,01	9	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 165.000.000	APBD		4 Laporan	Rp 165.000.000
5	2	3	2,01	10	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Rp 155.000.000	APBD		1 Laporan	Rp 125.000.000

Kode					Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5	2	3	2,01	12	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	Rp 110.000.000	APBD		3 Laporan	Rp 110.000.000
				9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Rp 250.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp 325.000.000
				10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Rp -	APBD		2 Laporan	Rp -
				11	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	Rp 130.000.000	APBD		2 Laporan	Rp 130.000.000
				12	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	13 Orang	Rp -	APBD		65 Orang	Rp -

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih periode 2016-2021 yaitu Menuju Kabupaten Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing pada misi IV yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik yang dioperasikan melalui rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2023. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual.
3. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamongan maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BPKAD Kabupaten Lamongan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

KHUSNUL YAQIN, S.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670524 199302 1 004